

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2016 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L/Pemda level 1 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

B. Capaian Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2016.

1. Ikhtisar Kinerja

Laporan kinerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun pertama dalam periode Renstra 2015-2019 BPKP. Dalam renstra periode 2015-2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian Indikator Kinerja *Outcome* dan *Output* tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Capaian Kinerja *Outcome*
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara					
1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	%	45	54,76	121,69
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100	80	80
3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60	100	166,67

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/ Korporasi					
4	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100	100	100
5	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	16,67	166,70
6	Persentase BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	52	16,67	32,06
7	Presentase BLUD yang kerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	58	0	0
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda					
8	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100	100	100
9	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	16,67	16,67	100
10	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	66,67	83,33	100
11	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	16,67	0	200
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP					
12	Persepsi Kepuasan Layanan Kesestamaan	Likert	7	7.8	111,44

Tabel 3.2
Ikhtisar Capaian Kinerja Output
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2016	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	99	98	98,99 %
		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	25	25	100,00%
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	2	2	100,00%
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Lap	80	80	100,00%
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	5	5	100,00%

Jumlah realisasi kegiatan pengawasan tahun 2016 sebanyak 374 penugasan atau 296,83% dari target tahun 2016 sebanyak 126 penugasan pengawasan. Realisasi kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari 125 penugasan pengawasan (PKPT-KF-1) yang diprogramkan dan 249 penugasan pengawasan diluar yang diprogramkan (Non-PKPT-KF3). Adapun rencana dan realisasi penugasan pengawasan yang diprogramkan terdapat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan (PKPT)

No.	Bidang	Jumlah PP		Capaian (%)
		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	48	48	100%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	4	4	100%
3	Pengamanan Aset	18	17	94,44%
4	Perbaikan <i>Governance System</i>	56	56	100%
	Jumlah	126	125	99,21%

Sedangkan penugasan pengawasan diluar PKPT (Non PKPT) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Realisasi Penugasan Per Bidang (Non-PKPT)

No.	Bidang	Realisasi PP Non PKPT
1	2	3
1	Bidang Instansi Pemerintah Pusat	66
2	Bidang APD	99
3	Bidang Akuntan Negara	23
4	Bidang Investigasi	40
5	Bidang Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP	21
	Jumlah	249

2. Evaluasi Kinerja

a. Kinerja Pengawasan

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam menjalankan

fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM 1

**PERBAIKAN PENGELOLAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/KORPORASI**

Pencapaian sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional, Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi dan Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum.

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional dihitung berdasarkan Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi/saran/rencana tindak terpilih. Untuk Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi perhitungan didasarkan pada Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan temuan/saran evaluasi/audit kinerja pada BUMD dan BLUD. Sedangkan untuk melihat kinerja IKU Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum dinilai dengan Jumlah laporan yang diserahkan ke APH/K/L Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan.

Pencapaian sasaran program 1 didukung dengan dana sebesar Rp1.750.237.590,00 atau 90,83% dari anggaran sebesar Rp1.926.986.000,00 dan SDM sebanyak 8060 OH, atau 85,71% dari rencana sebanyak 9404 OH.

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 1 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 122,78% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana sebesar 90,83% dan penggunaan OH sebesar 85,71%.

Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Program 1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	%	45	54,76	121,69
2		Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100	80	80
3		Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60	100	166,67
Capaian Sasaran Program 1					(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3)/3 121,68% + 80% + 166,67% 122,78%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 1
PERBAIKAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN
PENGELOLAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Untuk Indikator Kinerja Utama satu pada Sasaran Program Satu yaitu Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional, dari total 126 rekomendasi terpilih terdapat 69 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau sebesar 54,76%. Dengan demikian dari target IKU 1 sebesar 45% dan realisasi 54,76% maka pencapaian IKU 1 adalah sebesar 121,69%.

Hasil ini diperoleh dari rekomendasi terpilih pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Adapun rekomendasi terpilih yang telah ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

- Audit Laporan Keuangan Proyek CCDP IFAD LOAN No 1-880-ID, Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara.
Rekomendasi yang diberikan kepada *Stakeholder* adalah melakukan koordinasi dengan PLN sektor Gorontalo untuk melakukan pemasangan travo di lokasi pabrik es dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap

kekuatan struktur bangunan serta menginstruksikan penyedia barang/jasa untuk melakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015
Rekomendasi yang diberikan kepada *Stakeholder* adalah melakukan sosialisasi mengenai tata cara penatausahaan keuangan dengan menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual, menyampaikan data-data yang diperlukan dan menyusun Laporan Keuangan masing-masing SKPD, dan melakukan penginputan data aset tetap atas realisasi belanja modal tahun 2015
- Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Pada Kabupaten Boalemo
Rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* adalah menyusun prosedur operasi standar perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan pendukungnya serta Menyusun sistem pengendalian intern yang efektif, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian; terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- Rekomendasi Strategis Pada Bidang Investigasi
Perlu dilakukan perbaikan kualitas tata pemerintahan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap enam prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan (*fairness*), efisiensi, dan efektifitas, untuk pelayanan publik upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi, dan perlu ditingkatkan pewujudan iklim bagi pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui strategi preventif, strategi represif, dan solusi kesisteman.
- Peningkatan Kapabilitas APIP
Rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* adalah perlunya sosialisasi mengenai internal audit charter kepada seluruh auditan agar Inspektorat dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, sosialisasi ini dilakukan melalui kepala daerah agar seluruh auditan mematuhi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 SASARAN PROGRAM 1
PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TATA KELOLA, MANAJEMEN
RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KORPORASI

Untuk Indikator Kinerja Utama dua pada Sasaran Program Satu yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi, dari total 20 rekomendasi terpilih terdapat 16 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau sebesar 80%. Dengan demikian dari target IKU 2 sebesar 100% dan realisasi 80% maka pencapaian IKU 2 adalah sebesar 80%.

Adapun Rekomendasi untuk Koporasi yang tekah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja RSUD Toto Kabila
Rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* adalah menyusun metode pengumpulan data serta melakukan rekonsiliasi secara berkala atas beberapa sumber data sebelum digunakan untuk proses evaluasi SPM dan Meningkatkan peran dan layanan SPI dalam membantu pencapaian tujuan RSUD.
- Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Pohuwato
Rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* adalah melakukan pengujian uji atas limbah cair secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan pada beberapa pelayanan agar dapat mengukur mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Evaluasi Kinerja BLUD MM Dunda
Rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* adalah meningkatkan kapasitas SPI agar dapat menjalani tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan berlaku dan melakukan penilaian risiko secara menyeluruh dalam pengelolaan Rumah Sakit.
- Rekomendasi terkait kinerja PDAM adalah sebagai berikut:
 - Melakukan efisiensi yang maksimal sehingga dapat menekan biaya operasi dengan tetap meningkatkan pendapatan;
 - Meningkatkan efektivitas penagihan pelanggan agar jumlah piutang tidak semakin meningkat melebihi meningkatnya jumlah penjualan per hari;
 - Menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen aset untuk pelaksanaan pengelolaan aset secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan;

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperluas jaringan dan melakukan kegiatan operasional bisnis yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga dapat memperoleh laba setiap tahun;
- Meningkatkan konsumsi air domestik hingga mencapai $\geq 30 \text{ m}^3$ per pelanggan rumah tangga per bulan berdasarkan kriteria penilaian BPPSPAM dengan cara mensosialisasikan penggunaan air bersih yang berasal dari PDAM untuk kebutuhan sehari-hari;
- Meningkatkan efisiensi pada sistem distribusi air ke pelanggan dengan cara mengganti *water meter* yang rusak, melakukan kalibrasi *water meter* secara berkala, memasang *water meter* induk dan melakukan perawatan berkala terhadap pipa-pipa pelanggan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 SASARAN PROGRAM 1
PENYERAHAN HASIL PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN KEPADA APARAT
PENEGAK HUKUM

Untuk Indikator Kinerja Utama tiga pada Sasaran Program Satu yaitu Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum, dari total 11 jumlah permintaan penugasan di luar Pemberian Keterangan Ahli seluruh laporannya telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian dari target IKU 3 pada Sasaran Program 1 sebesar 60% dan realisasi 100% maka pencapaian IKU 3 pada Sasaran Program 1 adalah sebesar 166,67%.

Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas permintaan Kejaksanaan:

- (1) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan pada Pelaksanaan Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.
- (2) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) Ruas Jalan : Ruas Jalan Tangga Barito, Ruas Jalan Bongo Nol-Bongo I (AC-BC), dan Ruas Jalan Akses Pelabuhan Tilamuta pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014.
- (3) Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I

pada Desa Mootayu Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015.

- (4) Audit PKKN atas Kasus Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana PNPM-MP3KI pada Pekerjaan Tambatan Perahu di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014.
- (5) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada BUMD PT Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014.
- (6) Audit PKKN atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan atas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014.
- (7) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 15 GT dan 7 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2012.

Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas permintaan Kepolisian:

- (1) Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pelaksanaan Penerimaan/Pemungutan atas Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Gorontalo Tahun 2015.
- (2) Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana PNPM-MP3KI pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Desa Tangga Barito dan Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014.

SASARAN PROGRAM 2 **MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN SPIP PADA PEMERINTAH** **DAERAH/ KORPORASI**

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur dengan menggunakan empat IKU, yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”,.

Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Demikian pula Sistem Pengendalian Intern pada sektor korporasi.

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya maturitas SPIP" diukur dengan menggunakan empat IKU, yaitu "Maturitas SPIP K/L (level 3)", "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)", "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)", "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina", dan "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina" dengan ikhtisar sebagai berikut.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Program 2

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/ Korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100	100	100
2		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	16,67	166,70
3		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	52	16,67	32,06
4		Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	58	0	0
	Capaian Sasaran Program 2				(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3 + IKU 4)/4 (100% + 166,70% + 32,06% + 0)/4 74,69%	

Pencapaian sasaran program 2 didukung dengan dana sebesar Rp379,460,921.00 atau 92,41% dari anggaran sebesar Rp410.646.000,00 dan SDM sebanyak 1.748 OH, atau 85,73% dari rencana sebanyak 2.039 OH.

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 2 belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 74,69% lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 92,41% dan penggunaan OH sebesar 85,73%. Kondisi ini disebabkan rancangan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target pembinaan SPIP sehingga tingkat maturitas SPIP pada Pemda dan Korporasi mitra kerja BPKP belum mencapai target level 3. Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 SASARAN PROGRAM 2
MATURITAS SPIP PEMERINTAH PROPINSI (LEVEL 3)

IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diharapkan berada pada level 3. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai tingkat maturitas SPIP level 3. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" adalah 100% dari target sebesar 100%.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan level maturitas SPIP Pemda antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan memberikan bimtek untuk peningkatan level maturitas SPIP;
2. Menyusun strategi peningkatan level maturitas untuk digunakan oleh K/L/P dalam meningkatkan level maturitas SPIP;
3. Membentuk satgas koordinasi SPIP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penugasan peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Gorontalo.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 SASARAN PROGRAM 2
MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (LEVEL 3)

IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan berada pada level 3. Sebagaimana maturitas Pemerintah Provinsi, maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur menggunakan skala 0-5.

Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target level maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2016 adalah 10% dari 6 jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Sampai dengan tahun 2016, dari 6 pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, hanya satu yang mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 dengan catatan yaitu Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan nilai maturitas sebesar 2,94. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota (Level 3)" adalah 16,67% dari target sebesar 10%.

Berikut tabel capaian Maturitas SPIP Kabupaten/Kota pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

Tabel 3.7
Capaian Maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Provinsi Gorontalo

No	Pemerintah Daerah	Skor Tahun 2016	Target Tahun 2019
1	Kota Gorontalo	2,73	3,00
2	Kabupaten Gorontalo	2,94	3,00
3	Kabupaten Bone Bolango	1,42	3,00
4	Kabupaten Gorontalo Utara	1,80 **	3,00
5	Kabupaten Boalemo	1,42	3,00
6	Kabupaten Pohuwato	2,33	3,00

** Penilaian Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 SASARAN PROGRAM 2
PERSENTASE BUMD YANG KINERJANYA MINIMAL BERPREDIKAT BAIK DARI
BUMD YANG DIBINA)

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan terhadap BUMD di wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah.

IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD kinerjanya dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 16,67% atau mencapai 32,06% dari target sebesar 52%. Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 1 BUMD dari 6 BUMD yang dievaluasi.

Berikut tabel capaian BUMD yang Kinerjanya Berpredikat Baik pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

Tabel 3.8
Capaian BUMD yang Kinerjanya Berpredikat Baik

PDAM				
Kota/Kabupaten	BPPSPAM	Ket	KEPMENDA GRI	Ket
Kota Gorontalo	3,600	Sehat	62,31	Baik
Kab. Gorontalo	2,800	Kurang Sehat	54,93	Cukup
Kab. Bone Bolango	2,815	Sehat	42,24	Kurang
Kab. Boalemo	2,430	Kurang Sehat	50,50	Cukup
Kab. Pohuwato	2,845	Sehat	54,07	Cukup
PERUSAHAAN DAERAH LAINNYA				
NAMA PERUSAHAAN DAERAH	NILAI	KETERANGAN		
PT Boalemo Idaman Gorontalo	51,50	Kurang		

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 SASARAN PROGRAM 2
PERSENTASE BLUD YANG KINERJANYA MINIMAL BERPREDIKAT BAIK DARI
BLUD YANG DIBINA)

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamankan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.

IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0% atau mencapai 0% dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan hasil dari 3 BLUD yang dibina.

Berikut tabel capaian BLUD yang Kinerjanya Berpredikat Baik pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

Tabel 3.9
Capaian BLUD yang Kinerjanya Berpredikat Baik

No	Nama Rumah Sakit	Tingkat Kinerja			Predikat Tingkat Kesehatan RSD
		Aspek Keuangan	Aspek Pelayanan	Skor	
1	2	3	4	5	6
1	RSUD Toto Kabila	15,7	43,02	58,72	Sedang
2	RSUD Bumi Panua	19,05	43,70	62,75	Sedang
3	RSUD M.M. Dunda Limboto	19,15	43,78	62,93	sedang

SASARAN PROGRAM 3 **MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN PEMDA**

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem

pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (*Integrated*), jika dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) tahun 2009.

Sebagaimana diketahui dalam kerangka IACM kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Seiring dengan pelaksanaan program dimaksud, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 (Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015) disertai Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015) untuk dipergunakan oleh seluruh unit APIP di Indonesia, yang mencakup Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP Secara Mandiri (*Self Assessment*), Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP (*Quality Assurance*), Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Secara Mandiri (*Self Improvement*), dan Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Perkembangan Level Kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2015 dan 2016 nampak dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Level Kapabilitas APIP Tahun 2015

No	Inspektorat	Level Tiap Elemen						Level APIP
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Provinsi Gorontalo	2	2	2	2	2	2	2
2	Kota Gorontalo	2	2	2	2	2	2	2
3	Kabupaten Gorontalo	2	2	1	2	2	1	2 dengan catatan
4	Kabupaten Boalemo	2	2	1	2	2	2	2 dengan catatan
5	Kabupaten Pohuwato	1	1	1	2	1	1	1
6	Kabupaten Bone Bolango	1	2	1	2	1	2	2 dengan catatan
7	Kabupaten Gorontalo Utara	1	1	1	1	1	1	1

Tabel 3.11
Level Kapabilitas APIP Tahun 2016

No	Inspektorat	Level Tiap Elemen						Level APIP
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Provinsi Gorontalo	3	3	2	2	3	2	3 dengan catatan
2	Kota Gorontalo	3	2	2	3	3	2	3 dengan catatan
3	Kabupaten Gorontalo	2	3	2	2	3	2	2
4	Kabupaten Boalemo	2	2	2	2	2	2	2
5	Kabupaten Pohuwato	2	2	1	2	2	1	2 dengan catatan
6	Kabupaten Bone Bolango	1	2	1	2	1	2	2 dengan catatan
7	Kabupaten Gorontalo Utara	1	2	2	2	1	1	2 dengan catatan

Peningkatan level kapabilitas di tahun 2016 tidak luput dari upaya APIP di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dalam memenuhi Infrastruktur Kapabilitas yang dipersyaratkan serta internalisasinya secara terus menerus. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai Instansi Pembina APIP di wilayah Provinsi Gorontalo berupaya mendorong peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Gorontalo melalui berbagai kegiatan, antara lain :

- *Quality Assurance* dalam peningkatan kapabilitas APIP
- Bimtek Evaluasi SOP di lingkungan APIP se-Provinsi Gorontalo
- *Quality Assurance* dalam penyusunan RTP SPIP

- Bimtek Audit Kinerja
- Bimtek Audit Investigasi

Hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2016 terhadap 7 APIP menunjukkan sebanyak 1 APIP Provinsi atau 100% APIP telah berada pada level 3 (*Integerated*) dengan target 100% yang artinya capaian IKU 1 pada sasaran program 3 adalah 100%. Untuk Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota menuju level 3 terealisasi 16,67% dari target 16,67%, dengan capaian 100% untuk IKU 2 pada sasaran program 3. Pada IKU 3 yaitu Kapabilitas APIP Menuju Level 2 terelisasi sebanyak 83,33% dari target 66,67% APIP Kabupaten/Kota dengan capaian maksimal 100% dari target. Sedangkan untuk IKU 4 realisasi 0% dari target 16,67% dengan capaian 200% dengan menggunakan rumus *minimize*.

Berikut tabel Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Program 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100	100	100
2		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	16.67	16.67	100
3		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	66.67	83.33	100
4		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	16.67	0	200
Capaian Sasaran Program 3				(IKU 1 + IKU 2 + IKU 3 + IKU 4)/4 (100% + 100% + 100% + 200)/4 125%		

Pencapaian sasaran program 3 didukung dengan dana sebesar Rp75.660.510.00 atau 94,57% dari anggaran sebesar Rp80.003.000,00 dan SDM sebanyak 354 OH, atau 86,98% dari rencana sebanyak 407 OH.

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 3 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran

strategis sebesar 125% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan dana sebesar 94,57% dan penggunaan OH sebesar 86,98%.

b. Kinerja Dukungan Pengawasan

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mendukung berjalannya fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut

SASARAN PROGRAM 4 **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DUKUNGAN TEKNIS DALAM** **PENGAWASAN BPKP**

Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” meliputi empat layanan yaitu kepegawaian, keuangan, keprolapan serta umum. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” sebesar 7,8 skala likert atau mencapai 111,44% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat layanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Program 4

No	Layanan	Skor Persepsi	Target	Capaian (%)
1	Kepegawaian	7.73	7	110.38
2	Keuangan	8.25	7	117.89
3	Prolap	7.58	7	108.30
4	Umum	7.64	7	109.17
	Rata-rata	7.80	7	111.44

Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” menyerap dana sebesar Rp11.284.894.280,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp11.860.933.000,00, dan SDM sebanyak 5.589 OH atau 76,07% dari rencana sebanyak 7.347 OH.

Dari sisi penggunaan dana dan sumber daya manusia (OH), IKU “Persepsi kepuasan layanan kesestamaan” telah dicapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 111,44% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 95,14% dan capaian OH sebesar 76,07%

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis, sasaran hasil (*outcome*), maupun sasaran keluaran (*output*) yang telah ditetapkan, dibutuhkan *input* berupa sumber daya salah satunya dana. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari anggaran berbasis kinerja.

Realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 3.14 di bawah ini merupakan realisasi sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2016. Selisih jumlah realisasi anggaran dalam sub bab Realisasi Anggaran ini dengan realisasi dana yang dijelaskan di dalam lampiran merupakan akibat dari pembulatan di dalam Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan (SIM Monev RKT).

1. Realisasi Anggaran per Program

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran per Program

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.417.635.000	2.205.358.467	91,22
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP	10.964.642.000	10.429.856.663	95,12
3	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	546.291.000	510.875.120	93,52
4	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	350.000.000	344.162.500	98,33
	JUMLAH	14.278.568.000	13.490.252.750	94,48

Dari tabel 3.14 dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp13.490.252.750 atau 94,48% dari anggaran sebesar Rp14.278.568.000,00. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sangat baik.

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No.	Kode Belanja	Jenis Belanja (DIPA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	51	Pegawai	9.021.094.000	8.946.273.814	99,17
2	52	Barang	4.907.474.000	4.199.816.436	85,58
3	53	Modal	350.000.000	344.162.500	98,33
	JUMLAH		14.278.568.000	13.490.252.750	94,48

Dari tabel 3.15 dapat diketahui bahwa belanja pegawai memiliki penyerapan paling baik pada angka 99,17%, diikuti belanja modal 98,33%, dan terakhir belanja barang dengan angka 85,58%.